

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 78 TAHUN 2023

TENTANG

TIM ANALISIS PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi hukum terhadap Peraturan Daerah Kota Pagar Alam dalam rangka regulasi dan deregulasi Peraturan Daerah agar Perauturan Daerah yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik, perlu dibentuk Tim Analisis Peraturan Daerah Kota Pagar Alam;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Analisis Peraturan Daerah Kota Pagar Alam;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
 - Nomor 12 Tahun 2011 2. Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan (Lembaran Peraturan Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Roadmap Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
- 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Dareah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 4);
- Peraturan Wali Kota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : membentuk Tim Analisis Peraturan Daerah Kota Pagar Alam, dengan susunan Tim sebagai berikut:

a. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

b. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
 Rakyat Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

c. Wakil Ketua : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.

d. Anggota : 1. Perancang Peraturan Perundang-Undangan;

Analis Hukum;

3. Penyuluh Hukum;

 Analis Peraturan Perundang-Undangan dan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Analis Legislasi;

Penyusun Bahan Bantuan Hukum;

Tenaga Pendukung Administrasi
 Perkantoran pada Bagian Hukum.

KEDUA : Tim Analisis sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan inventarisasi bahan peraturan daerah yang akan dianalisis;

b. melakukan analisis terhadap peraturan daerah;

c. melaporkan hasil evaluasi.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan atas berlakunya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kota Pagar Alam;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam pada tanggal 9 Februar 2023

WALI KOTA, PAGAR ALAM,

dto

ALPIAN MASKONI